



**NASIONALISME**

**PELATIHAN  
DASAR CPNS  
ANGKATAN  
XLIX BPS  
TAHUN 2020**



# About me....

## Euis Naya Sari

Kantor: Pusdiklat BPS  
Jln. Raya Jagakarsa No. 70,  
Lenteng Agung, Jakarta  
Telp. (021) 7873781-83

HP : 081383958830

Email : [enayasari@bps.go.id](mailto:enayasari@bps.go.id)  
[enayasari@gmail.com](mailto:enayasari@gmail.com)

# NASIONALISME



**Mata Diklat ini membahas Pembentukan Karakter melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai:**

- 1. Pembuat dan pelaksana kebijakan publik,**
- 2. Pelayan publik,**
- 3. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan analisis dampaknya.**

# INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Memahami peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN.
2. Memahami fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik
3. Memahami peran ASN sebagai pelayanan publik; dan
4. Memahami fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa
5. Menganalisis dampak apabila tidak mengaplikasikan nilai-nilai
6. Nasionalisme Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatannya



# ASPEK PEMBELAJARAN MATA DIKLAT NASIONALISME



Memahami nilai-nilai Nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 1 dan Sila 2)



Memahami ASN sebagai pelayan publik

Memahami nilai-nilai Nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 3 s/d Sila 5)



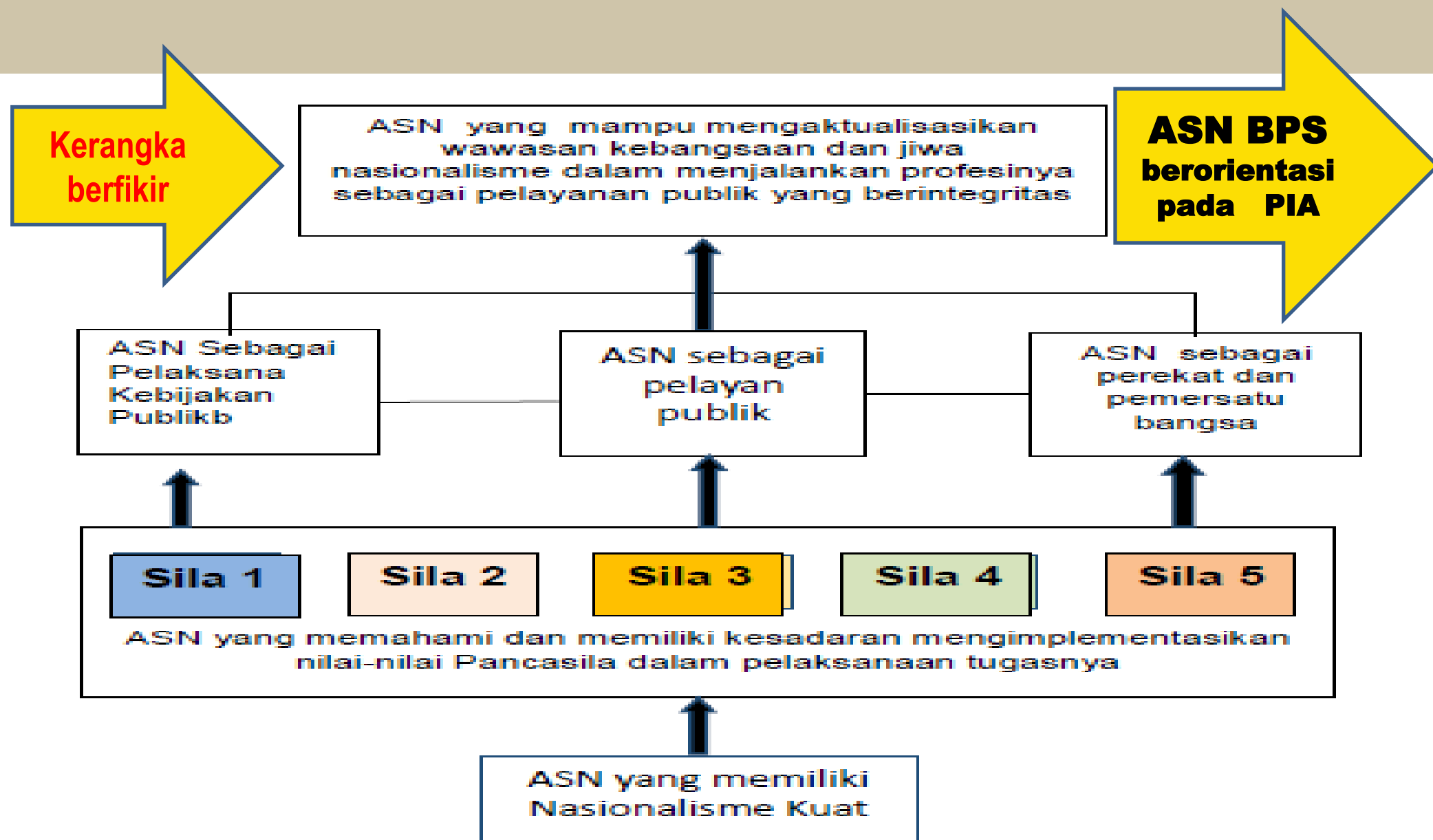
Memahami ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa

Memahami ASN sebagai pelaksana kebijakan publik



Mengaktualisasikan Nasionalisme bagi ASN





Gambar 1. Peta Kompetensi Dasar untuk Mata Diklat Nasionalisme ASN



# PENGERTIAN NASIONALISME MENURUT BEBERAPA TOKOH

1

Joseph Ernest Renan

- ✓ sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu-individu lain dengan dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Sebagai contoh adalah bangsa Swiss yang terdiri dari berbagai bangsa dan budaya dapat menjadi satu bangsa dan memiliki negara.

2

Hans Kohn

- ✓ kesetiaan tertinggi yang diberikan individu kepada negara dan bangsa

3

Louis Snyder

- hasil dari faktor-faktor politis, ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu taraf tertentu dalam sejarah. Sebagai contoh adalah timbulnya nasionalisme di Jepang



Implementasi Nilai Pancasila Dalam  
Membenagun Semangat  
Nasionalisme

---



# Sila Ke I : Ketuhanan yang Maha Esa

---

- Kebebasan dalam memilih agama dan menjalankannya

Hendaknya setiap individu saling menghormati antara agama yang satu dengan yang lainnya, misalnya :

1. Jika umat islam sedang merayakan ibadah hari raya idul fitri, sebaiknya umat yang lain tidak mengganggu ibadahnya
2. Tidak melarang umat islam untuk mengenakan jilbab pada suatu tempat. Dengan demikian, rasa nasionalis akan terpupuk dalam diri bangsa Indonesia.

# Sila ke 2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

---

- Mengamalkan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Sila ke dua dari pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menanamkan dan memberi rasa cinta kepada bangsa, antar individu, masyarakat dan lingkungan, misalnya dengan melakukan hal berikut :

1. Peduli terhadap sesama, saling membantu jika ada teman atau tetangga yang kesulitan.
2. Membantu korban bencana alam baik dengan dana maupun tenaga.
3. Memiliki etika dan sopan santun yang baik terhadap semua orang.

# Sila Ke 3 : Persatuan Indonesia

---

- Sila ke tiga dari Pancasila dapat diamalkan jika masyarakat menyadari bahwa manusia itu berada dalam keragaman dan golongan-golongan yang berbeda dan mempunyai keinginan untuk hidup bersama.
- Sila ke tiga dapat diimplementasikan dengan cara-cara berikut ini :
  1. Bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah, misalnya gotong royong memperbaiki jalan yang rusak atau bergotong royong membersihkan lingkungan.
  2. Saling melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, hal ini dapat dilakukan dari berbagai profesi, misalnya tentara yang melindungi rakyat dari serangan musuh, pegawai BPS yang membangun Indonesia dengan data-data yang dihasilkan, atau dokter yang mengobati pasiennya.
  3. Tidak Membedakan masyarakat berdasarkan etnis, agama dan kebudayaannya serta saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan.

# Sila ke 4 : Kemusyawaratan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

---

## Negara Menjamin Demokrasi

- Di Indonesia cara mengimplementasikan sila ke empat yaitu dengan cara bermusyawarah untuk memutuskan suatu hal yang menyangkut kepentingan banyak orang.
- Setiap orang berhak untuk memberi pendapat, saran, masukan, serta memilih wakil rakyat. Dengan cara memberikan suara untuk memilih wakil rakyat, maka artinya individu tersebut sudah mengamalkan sila ke empat dan turut berdemokrasi.

# Sila ke 5 : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

---

- Menghormati Hak-Hak Orang Lain

1. Implementasi sila ke lima dari Pancasila bisa dilakukan dengan cara menghormati hak-hak orang lain dan berlaku adil agar terpupuk rasa nasionalisme, misalnya pimpinan berlaku adil terhadap bawahannya dalam hal pemberian gaji dan memberikan tugas secara adil terhadap bawahannya atau seorang hakim yang memberikan hukuman seadil-adilnya kepada para narapidana.
2. Memberikan peluang kepada orang lain dalam mencapai hak dan tidak menghalang-halangnya.



**ASN SEBAGAI  
PELAKSANA  
KEBIJAKAN PUBLIK**

# Hello!

→ LATSAR CPNS GOL III  
→ ANGKATAN VI

MUHAMMAD ARIEF EKO PRATAMA  
YULIANA LIVI ANDAM PUTRI  
FITRIANI  
NADYA AMALIA  
RIA ANGGRAINI  
MARINI SYAFITRI  
OEMAR SYARIEF WIBISONO  
ANNISSA DYAH AGUNG P  
CINDY CANDRAWATI  
ENDANG YOANNA BR SEMBIRING  
IRMA HERMANIAR  
MIRANTI VERDIANA


A person wearing a light-colored, ribbed sweater is shown in profile, looking down at a smartphone held in their hands. The background is a blurred indoor setting, possibly a cafe or office. A large, solid blue diamond shape is overlaid on the center of the image, containing white text.

## **A. INDIKATOR KEBERHASILAN**



A top-down view of a desk with a spiral notebook, a pen, a water bottle, a plate of fruit, and a paint palette. The notebook is open and has a blue horizontal band across the middle. The text is centered on this band.

*Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik*



**B. ASN  
SEBAGAI  
PELAKSANA  
KEBIJAKAN  
PUBLIK**

A top-down view of a desk with a spiral notebook, a pen, a water bottle, a plate of fruit, and a paint palette. The notebook is open and blank, with a blue horizontal band across the middle containing the text. The pen is white and lies on the right page. The water bottle is white and has its lid off. The plate of fruit is in the top left corner, and the paint palette is in the top right corner.

*UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.*

**THIS IS A SLIDE TITLE**

→ Thomas R. Dye (1981):

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan/tidak dilakukan.



→ James E. Anderson (1975):

*“a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”*

→ Apa yang secara **nyata** dilakukan oleh aparat negara, di mana **kebijakan** ≠ **keputusan**.



## Kebijakan Publik

→ sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah (*government officials & agencies*).

# Implikasi dari pengertian yang dikemukakan oleh Anderson (1975):

Berorientasi pada pencapaian tujuan (*goal-oriented action*), bukan *random/sporadic*



Suatu pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

Suatu respon atas tuntutan kebijakan (*policy demands*) oleh aktor lain.



Berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah



Dapat bersifat positif maupun negatif.



## Tujuan kebijakan publik:

Tachjan (2006):

dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik), di mana nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara fisik maupun nonfisik oleh publik.



# Kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik

**Perumusan kebijakan**

**Implementasi kebijakan**

**Pengawasan & penilaian  
hasil kebijakan**

## Pengertian implementasi kebijakan publik

*“Policy implementation encompasses those actions by public & private individuals (groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large & small changes mandated by policy decisions.”*

Donald S. van Meter & Carl E. van Horn (1975)

## Pengertian implementasi kebijakan publik (2)

*Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan & disetujui.*

Tachjan (2006)

## Pengertian implementasi kebijakan publik (3)

*Pendekatan top-down, bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator/birokrat yang berada pada level bawah (street-level bureaucrat).*

Leo Agustino (2006)



**C. ASN YANG  
BERORIENTASI  
PADA  
KEPENTINGAN  
PUBLIK**



# ASN YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK

Menjamin aparatur sipil (birokrat) bebas dari intervensi kepentingan politik & atasan yang memiliki kepentingan subyektif

Memberlakukan sistem merit

Mengatur jabatan ASN sebagai jabatan terbuka & kompetitif

Upaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk

## Dimensi kualitas pelayanan (Gaspersz dalam Lukman (1998))

Ketepatan waktu pelayanan

Akurasi pelayanan

Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan

Tanggung jawab

Kelengkapan

Kemudahan mendapatkan pelayanan

Variasi model pelayanan

Pelayanan pribadi

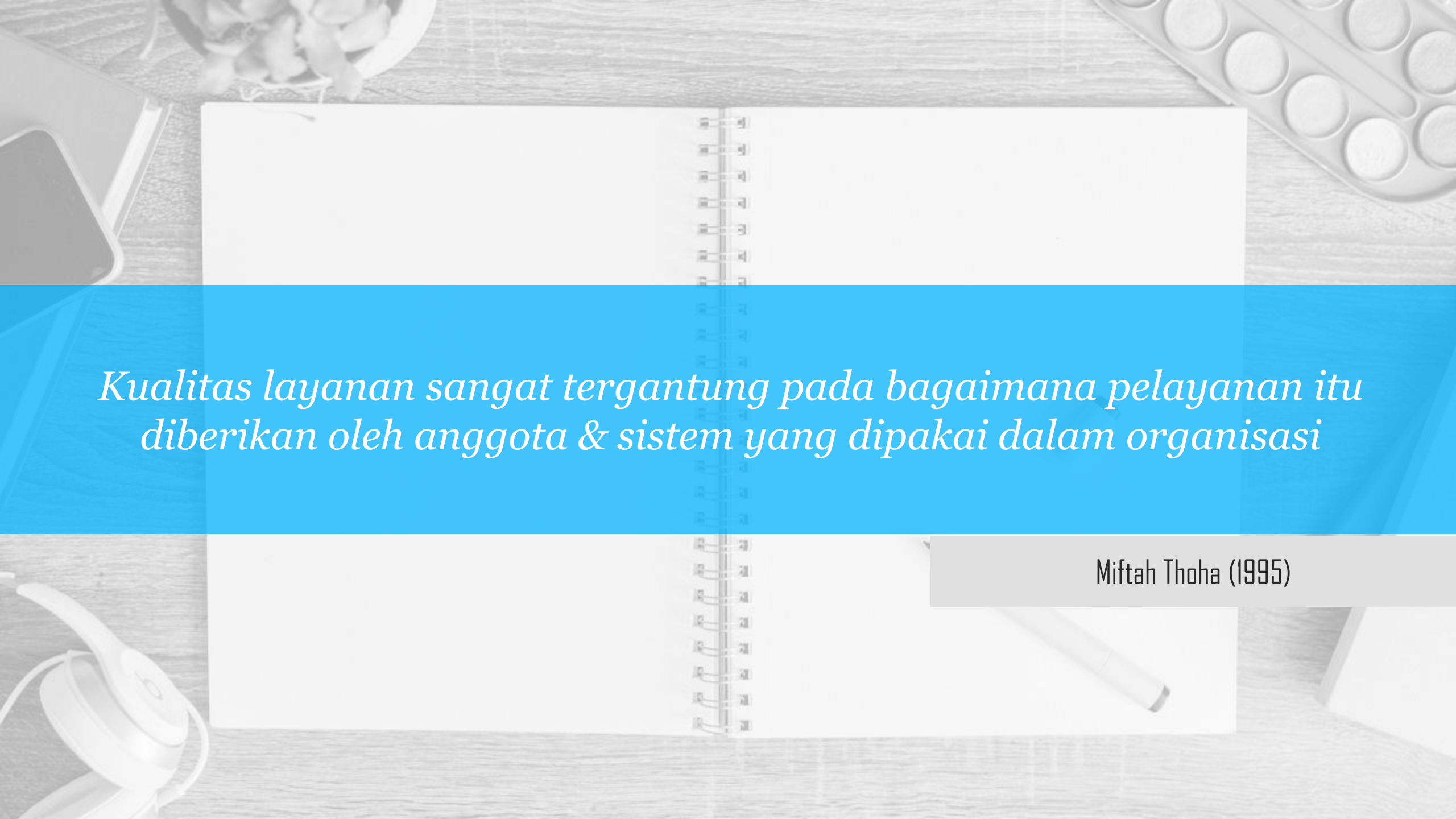
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan

Atribut pendukung pelayanan lainnya.

## 4 (empat) ciri utama birokrasi (Max Weber)

- Struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang (*delegation of authority*) dari atas ke bawah dalam organisasi.
- Posisi/jabatan yang masing-masing memiliki tugas & tanggung jawab yang tegas.
- Aturan, regulasi, & standar formal yang mengatur tata kerja organisasi & tingkah laku para anggotanya.
- Personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi & penampilan (*performance*).



A top-down view of a desk with a spiral notebook, a pen, a water bottle, and a paint palette. The notebook is open and blank, with a blue horizontal band across the middle. The pen is white and lies on the right page. The water bottle is white and on the left. The paint palette is on the right. The desk surface is light-colored wood.

*Kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota & sistem yang dipakai dalam organisasi*

Miftah Thoha (1995)

## 2 (dua) paradigma dalam pelayanan publik.

- (i) Pelayanan publik yang berorientasi pada pengelola pelayanan □ bersifat birokratis, direktif, & hanya memperhatikan & mengutamakan kepentingan pimpinan organisasi pelayanan sehingga masyarakat bukan sebagai yang diutamakan untuk dilayani.
- (ii) Pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan □ pemerintah yang memenuhi kebutuhan pengguna layanann

## Penyebab kegagalan dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik

- Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit
- Kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih & terampil dalam unit-unit local
- Kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab
- Adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang
- Kurangnya infrastruktur teknologi & infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik



**D. APARATUR  
SIPIIL NEGARA  
BERINTEGRITA  
S TINGGI**

## Pasal 5 UU ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi
2. Cermat dan disiplin
3. Melayani dengan hormat, sopan tanpa tekanan
4. Bertugas sesuai SOP dan Undang-undang
5. Bertugas sesuai perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga rahasia negara
7. Menggunakan BMN secara bertanggungjawab, efektif dan efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan
9. Memberikan informasi secara benar
10. Tidak menyalahkan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan
11. Memegang teguh nilai dasar ASN
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# INTEGRITAS

<http://kbbi.web.id/>



*“Mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.”*

Integritas nasional juga dipahami sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

SECARA ETIMOLOGIS

BAHASA LATIN

*Integer*

BAHASA INGGRIS

*Incorruptibility*



*yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral*

**Stephen Covey (2006)**

**KEJUJURAN**

**VS**





**INTEGRITAS**


**kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Sedangkan integritas yaitu melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan.**



**HUTSON  
(2005)**

**Kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki integritas**

-  Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani.
-  Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup.
-  Bertindak secara terhormat dan benar.
-  Terus membangun dan menjaga reputasi baik.

A person wearing a light-colored, ribbed sweater is shown from the chest up, looking down at a smartphone held in their hands. The background is a blurred indoor setting, possibly a cafe or office. A large, solid blue diamond is superimposed over the center of the image, containing white text.

E. Implementasi ASN  
Sebagai Pelaksana  
Kebijakan Publik

# Implementasi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan

Mau bekerja diluar instansi BPS

Menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan sektoral dan golongan

memberikan pelayanan tanpa melihat latar belakang

Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

memberikan data yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan

menolak gratifikasi dalam bentuk apapun

Menjunjung nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik



## Prinsip yang harus diperhatikan sebagai pelaksana kebijakan publik

Mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik

Mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik

Berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya

# PELAYANAN PUBLIK





▶ A | ASN  
PROFESIONAL



## ▶ ASN PROFESIONAL

Bekerja sesuai protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya

Birokrasi profesional adalah sekelompok petugas atau aparat pada sektor privat atau organisasi pemerintah yang bekerja secara profesional yang bertanggung jawab menjalankan fungsi dan mengimplementasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi tersebut.

Menurut **Bockel** terdapat dua komponen utama yang membentuk profesionalisme, yaitu **konten** dan **kontrol**.



## ▶ ASN PROFESIONAL

Lima aspek penting dalam reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu:

Adanya tuntutan masyarakat untuk menerapkan prinsip good governance

Adanya kritik dari masyarakat

Adanya tuntutan bahwa pemerintah seharusnya lebih memiliki sense of crisis.

Aparat pemerintah dituntut dapat bekerja profesional

Masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi mereka.






## ▶ ASN PROFESIONAL

Pemerintah kita sekarang membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang menguasai teknik-teknik manajemen pemerintah dan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan.

Dengan terwujudnya ASN yang profesional turut mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik yang mendorong kemajuan bangsa dan negara.




▶ **B**

ASN YANG  
MELAYANI  
PUBLIK



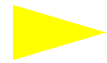
▶ UU NO. 25 TAHUN 2009  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK PASAL I AYAT (I)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.



▶ Penyelenggara pelayanan publik:  
Institusi penaseleggara negara  
Korporasi  
lembaga independen dan badan hukum lain

Pelaksana pelayanan publik:  
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang  
bekerja di dalam organisasi pelayanan publik.



## POIN PENTING MENGENAI PELAYANAN PUBLIK:

Tugas pelayanan, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Objek layanan adalah masyarakat atau publik.

Bentuk layanan berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.



▶ MENURUT ARIF FAIZAL DAN SUJUDI (1995),  
PELAYANAN YANG DIDAMBAKAN MASYARAKAT  
SECARA UMUM SEBAGAI BERIKUT:

Adanya kemudahan mendapatkan pelayanan

Memperoleh pelayanan secara wajar

Mendapatkan perlakuan yang adil

Pelayanan yang jujur dan terus terang

Pelayanan yang bermutu

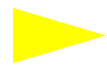


## FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA KUALITAS PUBLIK

Konteks monopolistik: tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah

Tekanan dari lingkungan

Budaya patrimonial: terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat.



## TUJUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK:

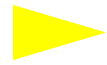
Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik





## PELAYANAN PRIMA

Pelayanan publik -> pelayanan prima -> kepuasan pelanggan

1. Adanya standar pelayanan
2. Bertujuan memuaskan pelanggan
3. Pelayanan sesuai standar yang ada



C



STANDAR  
PELAYANAN  
MINIMAL



- 
- ▶ Pasal 1 ayat (7) UU Pelayanan Publik menyebutkan yang dimaksudkan sebagai standar pelayanan adalah :

“ Tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

”



▶ Syarat minimum SPM dalam UU Pelayanan Publik pasal 21

- Dasar hukum
- Persyaratan
- Sistem, mekanisme, dan prosedur
- Jangka waktu penyelesaian
- Biaya/tarif
- Produk pelayanan
- Sarana, prasarana, atau fasilitas
- Kompetensi pelaksana
- Pengawasan internal
- ...



## ▶ SYARAT MINIMUM SPM DALAM UU PELAYANAN PUBLIK PASAL 21

- ...
- Penanganan pengaduan, suara, saran, dan masukan;
- Jumlah pelaksana;
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan, dan
- Evaluasi kinerja pelaksana.



▶ PASAL 18 UU PELAYANAN PUBLIK,  
HAK-HAK KONSUMEN

- Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan;
- Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- ...



▶ PASAL 18 UU PELAYANAN PUBLIK,  
HAK-HAK KONSUMEN

- ...
- Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
- ...



▶ PASAL 18 UU PELAYANAN PUBLIK,  
HAK-HAK KONSUMEN

- ...
- Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman;
- Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.





KETENTUAN DIATAS HARUS MENJADI ACUAN BAGI ASN DALAM MENJALANKAN PELAYANAN PUBLIK.

HAL INI DIMAKSUDKAN SUPAYA TERBENTUK PELAYANAN YANG PRIMA.

- Hak-hak konsumen harus menjadi pokok perhatian karena kepuasan pelanggan adalah yang utama dalam pelayanan publik.
- Hal ini diharapkan supaya persoalan birokrasi dan birokratisasi yang selama ini terkesan berbelit-belit, lambat, berbiaya mahal, tidak efisien, dan penuh KKN dapat teratasi.



▶ **D** | ASN  
BERINTEGRITAS  
TINGGI



## ▶ ASN BERINTEGRITAS TINGGI

### 12 Kode Etik dan Kode Perilaku ASN:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan BERINTEGRITAS TINGGI
2. tugas dengan cermat dan disiplin
3. Melayani dengan hormat, sopan dan tanpa tekanan
4. Melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan UU dan etika pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara



## ▶ ASN BERINTEGRITAS TINGGI

### 12 Kode Etik dan Kode Perilaku ASN:

7. Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain
10. Tidak menyalahgunakan informasi, tugas, status, kekuasaan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan INTEGRITAS ASN
12. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin ASN




## ▶ PENGERTIAN INTEGRITAS

Integritas berasal dari Bahasa Latin *Integer* atau Bahasa Inggris *Incorruptibility* – sikap teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral

Stephen R. Covey (2006)

“Honesty is TELLING THE TRUTH, in other word, **conforming our words reality** – Integrity is CONFORMING TO OUR WORDS, in other words, **keeping promises and fulfilling expectations**” atau lebih ringkasnya “**integrity is DOING WHAT WE SAY WE’LL DO**”

- 
- ▶ Hutson (2005) dalam tulisannya ***Trustworthiness*** mengemukakan bahwa orang-orang yang berintegritas memiliki kemampuan :
    - Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani
    - Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup
    - Bertindak secara terhormat dan benar
    - Terus membangun dan menjaga reputasi baik



E



IMPLEMENTASI  
ASN  
PROFESIONAL &  
BERINTEGRITAS



# IMPLEMENTASI ASN PROFESIONAL DAN MELAYANI YANG BERINTEGRITAS TINGGI

## ▶ KONDISI SEHARUSNYA

KEBUTUHAN SETIAP  
WARGA NEGARA  
TERPENUHI

AMANAT PEMBUKAAN  
UUD 1945

## ▶ KONDISI SEKARANG

BELUM SESUAI DENGAN  
KEBUTUHAN HARAPAN  
DAN CITA-CITA  
MASYARAKAT

## ▶ PENYEBAB

KETIDAKSIAPAN  
MENANGGAPI  
PERUBAHAN NILAI DAN  
TANTANGAN GLOBAL







▶ SIKAP  
PEMERINTAH

DIPERLUKAN KONSEPSI YANG MELIPUTI STANDAR  
PELAYANAN MINIMUM YANG HARUS DIPENUHI

DIPERLUKAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

SEBAGAI PEDOMAN, ACUAN, DAN REFERENSI

SEBAGAI STANDAR PENILAIAN



# ASN sebagai Pemersatu Bangsa

Dalam UU No. 5  
Tahun 2014 pasal 66  
ayat 1 dan 2, yang  
berisi tentang sumpah  
dan janji ASN,  
dinyatakan bahwa PNS  
akan senantiasa:

## Pasal 66

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:


bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

- 
- 
- Pentingnya PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2014.
  - Pada UU No. 5 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 disebutkan 13 asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN.

## Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterbukaan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;

Seorang ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa.

k. Persatuan dan kesatuan;

- l. keadilan dan kesetaraan, dan
- m. kesejahteraan.






# Contoh:

---

- ASN berasal dari berbagai suku, ras, dan agama dari seluruh Indonesia.
- Seorang ASN senantiasa harus bersikap profesional dalam segala kondisi, tidak membawa masalah pribadi dalam pelaksanaan pekerjaan negara.
- Seorang ASN hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.

ASN Menjaga Kondisi  
Damai

- 
- 
- Salah satu peran seorang ASN adalah menjadi pemersatu dan perekat persatuan.
  - Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk merekat persatuan adalah dengan cara menjaga kondisi damai di masyarakat.
  - Apabila terjadi konflik ditengah masyarakat, ASN dengan perannya sebagai perekat persatuan harus dapat bersikap netral dan menjadi fasilitator.
  - Tokoh tokoh yang terlibat dalam konflik dipertemukan dalam suatu ruang diskusi bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik.





---

# Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai



# 1. ASN bersikap netral dan adil

---

Netral dalam artian tidak memihak salah satu kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan, adil adalah tidak diskriminatif, objektif, jujur dan transparan.

- Misalnya: ASN tidak bergabung dalam suatu partai politik tertentu.



## 2. ASN Mengayomi Kepentingan Kelompok Minoritas

---

Hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuat kebijakan yang merugikan kelompok minoritas tersebut.

- Misalnya : tidak membuat kegiatan pada jumat siang atau minggu pagi karena dapat mengganggu kegiatan ibadah.



### 3. ASN Sebagai Figur Teladan Dilingkungan Masyarakat

---

ASN dalam lingkungan masyarakat harus dapat menjadi tokoh dan panutan. Sehingga setiap ucapan dan tindakannya tidak boleh bertentangan dengan agama dan nilai lokal masyarakat.

- Misalnya : seorang ASN dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak tanpa membeda bedakan status, golongan, suku, ras maupun agama



---

# TANTANGAN YANG DIHADAPI



# Wawasan Nasional Menurun

---

- Fragmentasi birokrasi yang berlebihan: spasial, etnisitas, afiliasi dan patronase politik
- Lokalisasi PNS: mobilitas antar daerah, antar susunan pemerintahan, dan antar sektor rendah. Beberapa kementerian mendidik, mengatur, dan menggajinya secara sektoral.
- Aparatur cenderung mengembangkan perspektif sempit/ sektoral, inward looking, dan semangat kedaerahan menguat.
- Ketidakmerataan distribusi pegawai antar daerah dan sektor. Migrasi negatif dari daerah tertinggal dan miskin menuju kepada daerah yang maju.



# Imparsialitas Terganggu

---

- Aktivisme politik meningkat; pilkada, kedaerahan, kepentingan kelompok, dsb. Imparsialitas dan kepedulian pada kepentingan publik terganggu.
- Intervensi politik dalam manajemen kepegawaian meningkat dan mengganggu imparsialitas.
- Stabilitas birokrasi rendah dan mengganggu kualitas pelayanan. Pergantian pejabat secara masif mengikuti dinamika politik lokal.



# Profesionalisme Menurun

---

- Komoditisasi dalam rekrutmen dan promosi. Praktik korupsi dalam pengelolaan pegawai meningkat.
- Promosi tidak berbasis merit sistem. Angka mismatch meningkat. Migrasi tenaga guru kedalam jabatan birokrasi meningkat.
- Insentif untuk menduduki jabatan fungsional kecil. Jumlah jabatan fungsional terbatas. Insentif untuk meningkatkan kemampuan teknis rendah





Terima Kasih